

20
24

Laporan Kegiatan
Pelaksanaan Anggaran
Kementerian Perdagangan
Tahun 2024 dan Pemberian
Penghargaan dengan Nilai
IKPA Terbaik

**LAPORAN PERJALANAN DINAS
NOMOR TU.04/5/PKTN.4.4/ST/01/2024**

- Kepada : Kuasa Pengguna Anggaran
- Dari : 1. *Aris Kusnandar*
- Hal : Laporan Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Anggaran Kementerian Perdagangan Tahun 2024 dan Pemberian penghargaan bagi Satuan Kerja dengan nilai IKPA terbaik
- Lampiran : Foto Kegiatan/Surat Tugas/Surat Undangan
- Tanggal : 23 – 24 Januari 2024
- Menimbang : Dalam rangka pelaksanaan kegiatan rapat koordinasi pelaksanaan Anggaran Kementerian Perdagangan Tahun 2024 yang menjadi ajang evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2023 dan penetapan strategi pelaksanaan anggaran tahun 2024.
- Dasar : 1. Surat Tugas Nomor TU.04/5/PKTN.4.4/ST/01/2024
2. Surat Undangan Plt Sekretaris Jenderal Nomor TU.03/43/SJ-DAG/UND/01/2024, tanggal 18 Januari 2024 perihal Undangan.
- Isi Laporan : 1. Rakor dibuka oleh Plt. Sekretaris Jenderal Perdagangan Bapak Suhanto.
2. Rakor diikuti oleh satker – satker dilingkungan Kementerian Perdagangan dan daerah penerima Dana Dekonsentrasi serta satker daerah penerima tugas pembantuan.
3. Agenda Rakor adalah pemberian penghargaan kepada Satker dengan Nilai IKPA terbaik dengan kategori Anggaran Rendah dibawah 25 M, dan Anggaran Tinggi diatas 25 M
4. BSML Regional IV selaku Satker dibawah Ditjen PKTN mendapat penghargaan Satker dengan nilai IKPA Terbaik ketiga, kategori Anggaran Rendah dibawah 25 M.

5. Rakor dilanjutkan dengan diskusi terkait evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2023 dan strategi pelaksanaan anggaran tahun 2024 oleh narasumber dari Ditjen Pembendaharaan Kementerian Keuangan.

Demikian laporan perjalanan dinas ini dibuat sebagai bahan pertanggungjawaban perjalanan dinas

Gowa, 25 Januari 2024
Yang Melakukan Perjalanan Dinas,

1. *Aris Kusnandar*

()

LAMPIRAN Dokumentasi Kegiatan



Acara Kegiatan



Tiba di Bandara Soeta



Menuju Ke Bandung by Whoos

BURAT TUGAS

NOMOR : TU.04/5/PKTN.4.4/ST/01/ 2024

Menimbang : a. Bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Standardisasi Metrologi Legal Regional IV mencakup kegiatan di dalam dan di luar kantor;
b. Bahwa untuk keperluan di luar kantor perlu diterbitkan Surat Tugas.

Dasar : 1. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 55 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Perdagangan;
2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran No. SP DIPA-090.09.2.447770/2024 BSML Regional IV tanggal 24 November 2023.

Memberi Tugas

Kepada : 1. Aris Kusnandar Nip. Pangkat/Gol.
Kepala Balai Standardisasi 198001102005021001 Pembina (IV/a)
Metrologi Legal Regional IV

Untuk : 1. Dalam rangka melaksanakan tugas Koordinasi Pelaksanaan Anggaran Kementerian Perdagangan Tahun 2024 dan Pemberian Penghargaan bagi Satuan Kerja dengan Nilai IKPA terbaik di Ruang Auditorium Kementerian Perdagangan, Jakarta, selama 2 (dua) hari dari tanggal 23 Januari 2024 sampai tanggal 24 Januari 2024;
2. Biaya Perjalanan Dinas yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas ini dibebankan pada DIPA Balai Standardisasi Metrologi Legal Regional IV T.A 2024 Kode Akun/Beban Biaya : 090.09.WA.3977.EBA.962.052.A.524111

Dalam melaksanakan tugas seluruh Pejabat dan Pegawai "**DILARANG MENERIMA GRATIFIKASI DALAM BENTUK APAPUN**". Setelah pelaksanaan tugas tersebut selesai agar menyampaikan laporan kepada Kepala BSML Regional IV.


Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Gowa, 22 Januari 2024

a.n: Direktur Metrologi

Kepala

Balai Standardisasi Metrologi Legal Regional IV *Le*



Aris Kusnandar

**KEMENTERIAN PERDAGANGAN
SEKRETARIAT JENDERAL**

Jalan. M.I. Ridwan Rais No.5 Jakarta 10110
Tel. 021-23528440, 021-3858171 Ext. 32040 Fax. 021-3441759
www.kemendag.go.id

Nomor : TU.03/ 43 /SJ-DAG.3/UND/01/2024 Jakarta, 18 Januari 2024
Sifat : Segera
Lampiran : 2 (dua) berkas
Hal : Undangan

Yth:
Daftar Terlampir
di Tempat

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Anggaran Kementerian Perdagangan Tahun 2024 yang akan menjadi ajang evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2023 dan penetapan strategi pelaksanaan anggaran tahun 2024 serta pemberian penghargaan bagi Satuan Kerja dengan nilai IKPA terbaik, bersama ini kami sampaikan agar Saudara dapat hadir dalam kegiatan dimaksud bersama 2 (dua) orang staf bagi Satker Pusat dan hadir secara daring bagi Satker Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 24 Januari 2024
Pukul : 09.00 WIB s.d. selesai
Tempat : - Ruang Auditorium, Gedung Utama Kementerian
Perdagangan, Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta
Pusat
- *Zoom Meeting*
Meeting ID : 895 7400 5860, Passcode : rakorpa
Jadwal : Terlampir

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,

Suhanto

Tembusan:
Inspektur Jenderal.

Lampiran I

Nomor : TU.03/ 43/SJ-DAG/UND/01/2024

Tanggal : 18 Januari 2024

Kepada Yth.

Satker Pusat

1. Kepala Biro Perencanaan
2. Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia
3. Kepala Biro Hukum
4. Kepala Biro Umum dan Layanan Pengadaan
5. Kepala Biro Hubungan Masyarakat
6. Kepala Biro Advokasi Perdagangan
7. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Perdagangan
8. Kepala Pusat Penanganan Isu Strategis
9. Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Perdagangan
10. Direktur Akademi Metrologi dan Instrumentasi
11. Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi
12. Kepala Pusat Pelatihan SDM Ekspor dan Jasa Perdagangan
13. Kepala KDEI
14. Sekretaris Badan Perlindungan Konsumen Nasional
15. Kepala Balai Pelatihan Aparatur Metrologi dan Mutu
16. Kepala Balai Pelatihan SDM Metrologi, Mutu, dan Jasa Perdagangan
17. Sekretaris Ditjen Perdagangan Dalam Negeri
18. Direktur Bina Usaha Perdagangan
19. Direktur Sarana Perdagangan dan Logistik
20. Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
21. Direktur Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
22. Direktur Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dan Perdagangan Jasa
23. Sekretaris Ditjen Perdagangan Luar Negeri
24. Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan
25. Direktur Ekspor Produk Industri dan Pertambangan
26. Direktur Impor
27. Direktur Fasilitasi Ekspor dan Impor
28. Direktur Pengamanan Perdagangan
29. Sekretaris Ditjen Perundingan Perdagangan Internasional
30. Sekretaris Inspektorat Jenderal
31. Inspektur IV
32. Sekretaris Ditjen Pengembangan Ekspor Nasional
33. Direktur Pengembangan Pasar dan Informasi Ekspor
34. Direktur Pengembangan Ekspor Produk Primer
35. Direktur Pengembangan Ekspor Produk Manufaktur
36. Direktur Pengembangan Ekspor Jasa dan Produk Kreatif
37. Sekretaris Bappebti
38. Sekretaris Badan Kebijakan Perdagangan
39. Sekretaris Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga
40. Direktur Pemberdayaan Konsumen

41. Direktur Standarisasi dan Pengendalian Mutu
42. Kepala Balai Pengujian Mutu Barang
43. Kepala Balai Kalibrasi
44. Kepala Balai Sertifikasi
45. Direktur Metrologi
46. Kepala BSML Regional I
47. Kepala BSML Regional II
48. Kepala BSML Regional III
49. Kepala BSML Regional IV
50. Kepala Balai Pengujian Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan
51. Kepala Balai Pengelolaan Standar Ukuran Metrologi Legal
52. Direktur Pengawasan Barang Beredar dan Jasa
53. Direktur Tertib Niaga
54. Kepala BPTN Medan
55. Kepala BPTN Bekasi
56. Kepala BPTN Surabaya
57. Kepala BPTN Makassar
58. Ketua Tim Bidang Pelaksanaan Anggaran Perwakilan Perdagangan Luar Negeri cq. Satker ITPC dan Satker Atase Perdagangan
59. Ketua Tim Bidang Perbendaharaan cq. Satker Sekretariat Jenderal

Satker Dekonsentrasi Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri

1. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau
2. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
3. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan
4. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Provinsi Jawa Timur
5. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi
6. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulawesi Tenggara
7. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Tengah
8. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku
9. Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan
10. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Bali
11. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Aceh
12. Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat
13. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung
14. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur
15. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat
16. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Provinsi Papua
17. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat
18. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Bengkulu

19. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara
20. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov Maluku Utara
21. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah
22. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Banten
23. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY
24. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Bangka Belitung
25. Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan
26. Kepala Dinas Koperindag Provinsi Gorontalo
27. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Timur
28. Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Provinsi Kepulauan Riau
29. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumatera Barat
30. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Papua Barat
31. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil, Menengah dan Perdagangan DKI Jakarta
32. Kepala Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Barat
33. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Utara
34. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulawesi Utara

Satker Dekonsentrasi Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri

1. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Bali
2. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat
3. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Tengah
4. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
5. Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Provinsi Jawa Timur
6. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Aceh
7. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara
8. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumatera Barat
9. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau
10. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi
11. Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan
12. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung
13. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat
14. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah
15. Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan
16. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Timur
17. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulawesi Utara
18. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

19. Kepala Dinas Perdagangan Sulawesi Selatan
20. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulawesi Tenggara
21. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku
22. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta
23. Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat
24. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur
25. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Provinsi Papua
26. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Bengkulu
27. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov Maluku Utara
28. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Banten
29. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Bangka Belitung
30. Kepala Dinas Koperindag Provinsi Gorontalo
31. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau
32. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Papua Barat
33. Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Barat
34. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Utara

Satker Tugas Pembantuan Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri

1. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon
2. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuningan
3. Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kendal
4. Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Blora
5. Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cilacap
6. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga
7. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Kebumen
8. Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan Kab. Gresik
9. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar
10. Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang
11. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Aceh Besar
12. Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Aceh Barat
13. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Langkat
14. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tipe A Kab. Labuhan Batu
15. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah Kabupaten Nias Utara
16. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Ketenagakerjaan Kabupaten Agam

17. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Solok
18. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur
19. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Tebo
20. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Empat Lawang
21. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Perindustrian Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Tanggamus
22. Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan Kab. Sambas
23. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab Paser
24. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Gowa
25. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Wajo
26. Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Maros
27. Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur
28. Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Bulukumba
29. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Takalar
30. Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kab. Pangkajene dan Kepulauan
31. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Bombana
32. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Baubau
33. Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kota Kendari
34. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumba Timur
35. Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Kaur
36. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Lebong
37. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bengkulu
38. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sorong
39. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Fak Fak
40. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majene
41. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kab. Aceh Jaya
42. Kepala Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, dan UKM Kabupaten Padang Pariaman
43. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Banyuasin
44. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru
45. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kerinci
46. Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Sampang
47. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kab. Tabalong
48. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Tana Tidung
49. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kab. Kaimana

50. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Nduga
51. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Merauke
52. Kepala Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan
53. Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Ogan Komering Ilir
54. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lebak
55. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan Kabupaten Ciamis
56. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Banggai
57. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Muna
58. Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kab. Pesisir Barat
59. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malinau
60. Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, UKM Kab. Teluk Bintuni
61. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Rokan Hulu
62. Kepala Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pasaman Barat
63. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Kota Tegal

Lampiran II
Nomor : TU.03/43/SJ-DAG /UND/01/2024
Tanggal : 18 Januari 2024

Jadwal Rapat Koordinasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024
Kementerian Perdagangan
Tanggal 24 Januari 2024

Hari/Tanggal	Waktu	Acara	Penanggung Jawab
Rabu, 24 Januari 2024	08.30 – 09.00	Registrasi	Panitia
	09.00 – 10.00	1. Pembukaan 2. Sambutan Plt. Sekretaris Jenderal 3. Penyampaian Penghargaan bagi Satker dengan Nilai IKPA Terbaik oleh Plt. Sekretaris Jenderal	Panitia
	10.00 – 11.30	Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023 dan Strategi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024 oleh Narasumber Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan	Moderator
	11.30 – selesai	Penutup	Panitia